PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BATAS KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yang terdaftar di kanwil DJP Jawa Barat 1)

SITTI JUARIAH – 21112718

Pembimbing

Dr. Ely Suhayati, SE.,M.Sli.,Ak.,CA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2017
Email : sitti.juariah@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pajak pada mulanya dibayar secara natura, yaitu pembayaran dengan menggunakan hasil pertanian, hasil hutan dan hasil perkebunan serta barang tambang mulia seperti emas dan perak kepada penguasa, selain itu juga pajak dapat dibayar dengan tenaga, yaitu dengan melakukan pekerjaan tanpa diberi imbalan, kemudian dengan sejalan perkembangan waktu perekonomian dengan menggunakan barter diganti dengan perauang sebagai alat pembayaran berakibat perubahan pembayaran (Siti Kurnia Rahayu,2010:5).

Penerimaan pajak memegang peranan penting dan merupakan penerimaan negara yang terus meningkat dibandingkan dengan penerimaan dari sektor migas (Mardiasmo 2011:2). Pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri, sehingga target penerimaan dari pajak ini terus meningkat setiap tahun dan merupakan potensi yang cukup besar untuk bisa digali, penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti, pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan negara, kebutuhan dana untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, serta semakin terbatasnya alternatif sumber-sumber keuangan negara, memang menuntut Pemerintah meningkatkan penerimaan sektor pajak sehingga tak heran saat ini pajak memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan negara Indonesia (Agusti dan Herawaty, 2009:2).

Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun
pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.(Siti Resmi, 2013:169). Pajak penghasilan terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (Dina, dkk, 2009:2)

Penerimaan pajak adalah sumber yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat, faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah peningkatan penghasilan tidak kena pajak (John Hutagol 2007:325).

Menurut UU No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (3) kepada orang pribadi sebagai

Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penjelasan ayat tersebut bahwa dalam menghitung Laba Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor /PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka akan mengakibatkan penurunan pajak yang akan disetorkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menyebabkan kemungkinan penurunan penerimaan pajak penghasilan (Rizki Wulandari, 2015).

Kenaikan PTKP berdampak tidak saja pada penerimaan pajak itu sendiri tetapi juga pada perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan pajak,naiknya PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak dilakukan penyesuaian (Putri Indrayanti, 2014).

Wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP) (Siti Kurnia Rahayu 2013: 84).

1.2 Identifikasi Masalah

1) Jumlah wajib pajak di wilayah Jawa Barat 1 hanya 3 juta orang sedangkan kepatuhan masih 50%.
2) Kenaikan penghasilan tidak kena pajak menyebabkan penurunan terhadap penerimaan pajak.
3) Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi belum mencapai target.

1.3 Rumusan Masalah

1) Seberapa besar pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2) Seberapa besar pengaruh kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan menggunakan data yang diperoleh dan diuji empiris, guna memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kenaikan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

   Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

   Dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahandan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidan yang sama, yaitu Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

1.5.2 Kegunaan Akademis.

1. Bagi Peneliti

Dapat Menambah pengetahuan peneliti mengenai perpajakan lebih dalam, khususnya mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi serta salah satu syarat menempuh sidang usulan penelitian jenjang S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini juga diharapkan memberi referensi pada instansi Kantor wilayah DJP Jabar 1 mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

3. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti diharapkan dapat berguna sebagai referensi penelitian dalam rangka penelitian berikutny yang berkaitan dengan permasalahan perpajakan yang terjadi di Indonesia.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Mardiasmo (2011:23) definisi wajib pajak adalah sebagai berikut “Orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu yang memperoleh atau menerima penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi wajib pajak dalam negeri”.

Menurut Erly Suandi (2011:105) definisi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut “Orang pribadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

2.1.1.1 Indikator Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Indikator Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Mardiasmo adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar.

2.1.2 Definisi Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP)

Menurut Djoko Mulyono (2009:191) definisi penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut “Batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan”.

Menurut Siti Resmi (2013:96) definisi penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut “Penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan”.

2.1.2.1 Indikator Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP)

Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Djoko Mulyono (2009 : 191) adalah besaran penghasilan tidak kena pajak.

2.1.3 Definisi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Triani Suryarini dan Tarsis Tarmudji (2012:62) pajak penghasilan adalah sebagai berikut: “Pajak yang dibebankan pada penghasilan perseorangan,perusahaan atau badan hukum lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya”.

Menurut Suparmono dan Theresia (2012:15) definisi pajak penghasilan orang pribadi adalah sebagai berikut: “Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan

dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat naik turunnya penerimaan pajak sendiri dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajaknya".

2.1.3.1 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2011:74) adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pegaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:90) kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Husein Nasution, Herawati, Dandes Rifa (2009) yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.2.2 Pengaruh PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Etty Musyasarroh (2012:42) yaitu kenaikan penghasilan tidak kena pajak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan karena dengan kenaikan besaran penghasilan tidak kena pajak mempersulit perolehan pajak penghasilan. Hasil penelitian Novita E (2013) peningkatan penghasilan tidak kena pajak mengakibatkan penuruanan penghasilan kena pajak,jika pajak penghasilan yang dibayarkan turun makan jumlah penerimaan pajak akan ikut turun.

2.3 Hipotesis

Maka hipotesis penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

H1 : Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

H2 : Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

III Metodologi Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono (2011:7) penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut :

"Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistika"

Menurut Umi Narimawati (2010:127) metode penelitian adalah sebagai berikut :

"Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2011:29) metode deskriptif adalah sebagai berikut :

"Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Metode verifikatif menurut Mashuri (2008:45) dalam Umi Narimawati (2010:29) adalah sebagai berikut :

"Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Berdasarkan pengertian diatas objek dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi, kenaikan penghasilan tidak kena pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan pengertian diatas maka unit analisis dalam penelitian ini adalah pribadi di 10 KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat 1 selama tahun 2011-2015 yaitu KPP Pratama Garut, KPP Pratama Bandung Majalaya, KPP Pratama Sukabumi, KPP Pratama Cianjur, KPP Pratama Purwakarta, KPP Pratama Tasikmalaya, KPP Pratama Ciamis, KPP Pratama Sumedang, , KPP Pratama Cicadas dan KPP Pratama Soreang serta data kenaikan penghasilan tidak kena pajak selama tahun 2011-2015.

3.2 Oprasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang digunakan yaitu:

1) Variabel Bebas (*Independent variable*)

Menurut Sugiyono (2011: 39) menyatakan bahwa :

"Variable bebas (*independent*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat)".

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu jumlah wajib pajak orang pribadi dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak. Variabel jumlah wajib pajak orang pribadi diukur dengan menggunakan indikator jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan variabel kenaikan penghasilan tidak kena pajak diukur dengan menggunakan indikator besaran penghasilan tidak kena pajak.

2) Variabel terikat (*Dependent variable*)

Menurut Sugiyono (2011: 39) menyatakan bahwa :

"Variabel terikat (*dependent*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas".

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi diukur dengan menggunakan indikator realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

3.3 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh data dari tahun 2011-2015 terkait data jumlah wajib pajak orang pribadi, data besaran PTKP dan data realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di 10 KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat 1 selama tahun 2011-2015 yaitu KPP Pratama Garut, KPP Pratama Bandung Majalaya, KPP Pratama Sukabumi, KPP Pratama Cianjur, KPP Pratama Purwakarta, KPP Pratama Tasikmalaya, KPP Pratama Ciamis, KPP Pratama Sumedang, , KPP Pratama Cicadas dan KPP Pratama Soreang serta data kenaikan penghasilan tidak kena pajak selama tahun 2011-2015.

3.3.2 Tehnik Pengiumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode dokumentasi dan studi kepustakaan.

1) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari laporan-laporan yang telah diolah oleh pihak lain sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan.
2) Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan teori-teori yang mendasari penelitian, yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan analisis terhadap data dan informasi yang didapatkan dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I. Dalam penelitian ini penulis mempelajari buku-buku, artikel, dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3.4 Populasi, Sampel Dan Tempat Serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu data jumlah wajib pajak orang pribadi, kenaikan penghasilan tidak kena pajak dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat 1 periode 2011-2015.

3.4.2 Penentuan Sampel

Sampel yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah data jumlah wajib pajak orang pribadi, kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2011- pribadi di 10 KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP

Jawa Barat 1 selama tahun 2011-2015 yaitu KPP Pratama Garut, KPP Pratama Bandung Majalaya, KPP Pratama Sukabumi, KPP Pratama Cianjur, KPP Pratama Purwakarta, KPP Pratama Tasikmalaya, KPP Pratama Ciamis, KPP Pratama Sumedang, , KPP Pratama Cicadas dan KPP Pratama Soreang serta data kenaikan penghasilan tidak kena pajak selama tahun 2011-2015.

dengan kriteria:

1. Sampel terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat 1.
2. Sampel termasuk kedalam wilayah Kota dan Kabupaten Bandung serta Kota Sumedang.

3.4.3 Tempat dan waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di Kanwil DJP Jawabarat 1 yang beralamat di Jl. Asia Afrika No.114, Cikawao, Lengkong, Bandung Jawa Barat. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Maret 2016 - Agustus 2016.

3.5 Metode Pengujian Data

Dalam melalukan analisis statistik ada beberapa langkah pengujian statistik yang harus dilakukan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

a. Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik agar hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat tidak bias atau *Best Linier Unbiased Estimator* (*BLUE)*.

1) Uji Nomalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.Model regresi yang sahih (valid) adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Santosa dan Ashari, 2005:12). Data normal memiliki bentuk seperti lonceng. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov–Smirnov dengan koreksi Lilliefors.

Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah sebagai berikut :

a. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi data tidak normal
b. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi data normal

Pengujian normalitas dapat juga dilakukan dengan menggunakan *P-P Plot Test.* Pengujian normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Autokorelasi

Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin Watson (DW) untuk mendeteksi uji autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik Durbin-Watson (D-W) :

$$D-W = \frac{\sum\left(e_t - e_{t-1}\right)}{\sum e^2{}_t}$$

Sumber : Gujarati(2004: 467)

Kriteria uji: Bandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel Durbin-Watson:

a) Jika D-W< dL atau D-W > 4-dL, maka pada data tersebut terdapat autokorelasi
b) Jika dU< D-W < 4-dU, kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi
c) Tidak ada kesimpulan jika dL D-W ≤ dU atau 4-dU D-W ≤ 4-dL

Keterangan : dL = Batas bawah DW
dU = Batas atas DW

3) Uji Multikolineritas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF = 1/Tolerance. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011:106).

4) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Singgih Santoso (2012:240) untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu : deteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik di atas di mana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studientized*.

Maka dasar pengambilan keputusan :

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda, yaitu metode analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS.

a. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan peneliti adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen (X1,X2,…Xn) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:163). Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, yaitu jumlah wajib pajak orang pribadi dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi, kenaikan penghasilan tidak kena pajak adapun rumus yang digunakan:

Dimana:

$$Y = a + \beta_{Y\,1} + \beta_{Y\,2} + e$$

Y = penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
X1 = jumlah wajib pajak orang pribadi
X2 = kenaikan penghasilan tidak kena pajak
a = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0)
e = *error* yang ditolerir (5%)

b. Analis Kolerasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

c. Koefisien Determinan (*Adjusted R2*)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen, Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Sumber : Umi Narimawati (2010:50)

Keterangan :
KD = Koefisien Determinasi
r^2 = Koefisien Korelasi

d. Uji Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independent (X) yaitu jumlah wajib pajak orang pribadi (X_1) dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak (X_2) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebagai variabel dependen (Y), hipotesis yang diuji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t).

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: jumlah wajib pajak orang pribadi, kenaikan penghasilan tidak kena pajak terhadap satu variabel dependen, yaitu penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengenai, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya.

Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap variabel terikat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah :

Ho : $\beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap variabel terikat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Ha: $\beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap variabel terikat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas kenaikan penghasilan tidak kena pajak terhadap variabel terikat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah :

Ho : $\beta_2 = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kenaikan penghasilan tidak kena pajak terhadap variabel terikat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Ha : $\beta_2 \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan kenaikan penghasilan tidak kena pajak terhadap variabel terikat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Menentukan tingkat signifikan

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan ttabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel – variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam statu penelitian.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Jumlah wajib pajak orang pribadi dapat diukur dari laporan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar. Berikut tabel statistik deskriptif jumlah wajib pajak orang pribadi pada 10 KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat 1 periode 2011-2015.

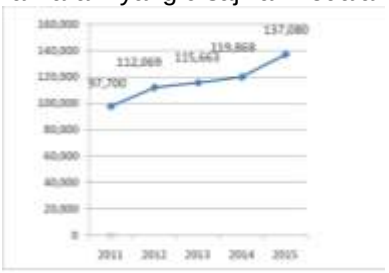
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (X_1)	50	66063.0	213222.0	116476.000
Valid N (listwise)	50			

Pada tabel *output* di atas, dapat dilihat nilai rata-rata jumlah wajib pajak orang pribadi pada 10 KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat 1 selama tahun 2011-2015 adalah sebanyak 116,476.000 wajib pajak dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar tertinggi mencapai 213,222.0 wajib pajak orang pribadi terjadi pada tahun 2015 pada KPP

Pratama Sukabumi, sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar terendah yaitu sebanyak 66,063 wajib pajak orang pribadi terjadi pada tahun 2011 pada KPP Pratama Sumedang.

Adapun perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar di 10 KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Bara 1 yang disajikan kedalam grafik, yaitu sebagai berikut :



Grafik Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada gambar grafik di atas, terlihat rata-rata jumlah wajib pajak orang pribadi pada 10 KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil Jawa Barat 1 periode 2011-2015, pada tahun 2015 mencapai dan nilai terendah terdapat pada tahun 2011 sebanyak 97,700 wajib pajak. Jika melihat pada garis *trendline,* perkembangan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung meningkat.

4.1.1.2 Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak

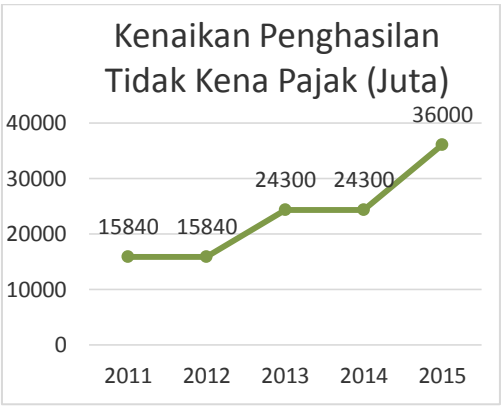
Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah kenaikan batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan.

Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak diukur dengan bersaran kenaiakan penghasilan tidak kena pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Batas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak	50	15840000	36000000	23256000.00
Valid N (listwise)	50			

Adapun perkembangan kenaikan penghasilan tidak kena pajak di 8 KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Bara 1 yang disajikan kedalam grafik, yaitu sebagai berikut :



Grafik Perkembangan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pada gambar grafik di atas, terlihat rata-rata jumlah wajib pajak orang pribadi pada 10 KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil Jawa Barat 1 periode 2011-2015 memiliki *trendline* yang cenderung meningkat. Hal ini menjawab fenomena mengenai kenaikan penghasilan tidak kena pajak yang terus mengalami peningkatan akan menurunkan penerimaan pengasilan orang pribadi.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan keniakan penghasilan tidak kena pajak disebabkan karena kenaikan penghasilan tidak kena pajak disesuaikan dengan upah minimum regional (UMR) yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga wajib pajak orang pribadi yang tadinya berkewajiban membayar pajak, tereliminasi karena penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak maka berdampak pada penurunan pajak penghasilan orang pribadi sehingga penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pun sulit mencapai target.

4.1.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi(Y)

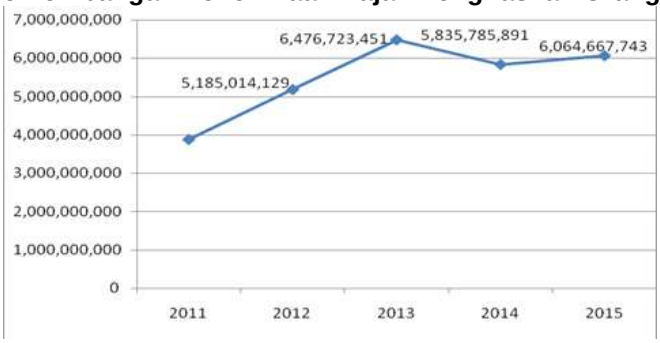
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	50	975514259.0	1179422314 1.0	5489517894.4 00
Valid N (listwise)	50			

Pada tabel *output* di atas, dapat dilihat nilai rata-rata penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada 10 KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat 1 selama tahun 2011-2015 adalah sebesar Rp. 5,489,517,894.400 dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tertinggi mencapai Rp. 1,1794,223,141.0 terjadi pada tahun 2014 pada KPP Pratama Bandung Tegallega , sedangkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi terendah yaitu sebesar Rp.975,514,259 terjadi pada tahun 2011 pada KPP Pratama Sumedang .

Adapun perkembangan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di 8 KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat 1 yang disajikan kedalam grafik, yaitu sebagai berikut :

Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi



Berdasarkan gambar 4.3 di atas dapat dilihat gambaran perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi tetapi jika melihat *trendline* perkembangan yang terjadi pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.Hal ini menjawab fenomena penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak mencapai target. Menurut Menurut Hendrian selaku Kabid Dukungan Teknis dan Konsultasi Kanwil DJP Jabar I (2015), dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir terjadi fluktuasi realisasi penerimaan pajak dan tidak pernah mencapai target realisasi 100%, pada 2011 pajak terealisasi 89% atau Rp12,124 T, pada 2012 penerimaan pajak terealisasi 97% atau Rp13,95 T, pada 2013 penerimaan pajak terealisasi 94% atau Rp16,410 T, pada 2014 sebesar **79%** dari target 2014 sebesar Rp19,826 T, pada 2015 sekitar 84,13 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp 25,6 T. Penerimaan pajak memang tidak pernah tercapai sesuai target, tetapi secara rupiah, penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

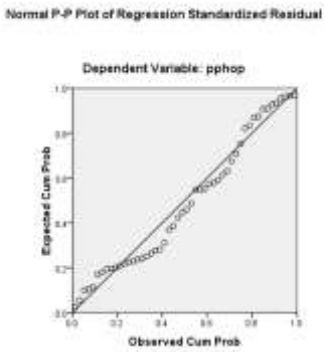
4.1.2 Hasil Analisi Verifikative

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Secara visual, deteksi normalitas residu dapat dilihat pada grafik probability plot. Jika titik-titik atau data residual menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi normal. Pengujian dilakukan dengan memanfaatkan bantuan program SPSS 20.0 dengan hasil sebagai berikut :

Grafik *Normal P-P Plot*



Pada gambar grafik *normal probability plots* di atas, terlihat titik yang ada menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal tersebut menunjukan bahwa residu dalam model regresi berdistribusi secara normal. Untuk memperkuat hasil uji normalitas secara visual di atas, maka dapat dilakukan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika probabilitas > 0,05 dapat disimpulkan bahwa residu dalam model berdistribusi secara normal atau penyebaran data normal. Dengan menggunakan program *SPSS* 20.0, diperoleh hasil uji sebagai berikut:

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters[a]	Mean	-.0000002
	Std. Deviation	2.82985401E9
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.122
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.862
Asymp. Sig. (2-tailed)		.447

a. Test distribution is Normal.

Uji Normalitas Model Regresi

Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan uji normalitas data, diketahui bahwa residu dalam model regresi yang akan dibentuk berdistribusi secara normal atau penyebaran data normal dikarenakan hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,447 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian salah satu syarat untuk pengujian regresi telah terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Masalah multikolinearitas dapat dideteksi dari nilai *tolerance* serta lawannya *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* yang diperoleh lebih besar dari 0,10 dan

VIF kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa model telah terbebas dari masalah multikolinearitas. Rangkuman hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (X_1)	.831	1.204
	Batas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak(X_2)	.831	1.204

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)

Sumber: Hasil olah data menggunakan program SPSS 20.0

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4. diatas nilai *tolerance* ketiga variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF semua variabel kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi untuk terbebas dari masalah multikolineritas atau tidak terdapat korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna telah terpenuhi.

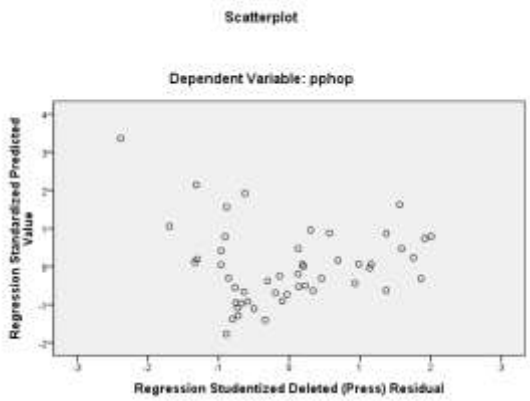
3. Uji Heteroskadastisitas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Berikut ini dilampirkan grafik *scatterplot* untuk menganalisis apakah terjadi heterokedaktisitas atau terjadi heterokedaktisitas, adapun alat pengujian yang digunakan oleh penulis adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (SDRESID) dengan redsidualnya (ZPRED). Dengan menggunakan program SPSS 20.0, diperoleh grafik sebagai berikut:

Grafik *Scatterplot*



Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas atau tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Dengan melakukan uji Durbin Watson, dapat diketahui apakah terdapat autokorelasi antarsesama urutan pengamatandari waktu ke waktu. Secara umum, kriteria yang digunakan adalah:

1. Jika *dU < dW < 4-dU* maka Ho diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi
2. Jika *dW < dL* atau *dW > 4-dL* maka Ho ditolak, artinya terjadi autokorelasi
3. Jika *dL < dW < dU* atau *4-dU < dW < 4-dL*, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Uji Autokorelasi
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.379[a]	.144	.107	2.8894E9	2.074

a. Predictors: (Constant), Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi(X_1),Batas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak(X_2)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)

Sumber: Hasil olah data menggunakan program SPSS 20.0

Dari hasil perhitungan diperoleh angka DW sebesar 2,078 Setelah melihat tabel statistik Durbin-Watson (n=50 dan k=2), diperoleh batas bawah nilai tabel (d_L) = 1,462 dan batas atasnya (d_U) = 1,628. Berpedoman pada kriteria umum yang telah disebutkan diatas, karena nilai DW sebesar 2,074 berada diantara du (1,628) dan 4-d_U (2,372), maka dapat dipastikan tidak terdapat autokorelasi atau tidak terdapat terdapat korelasi antar variabel pengganggu (ε) pada data yang mengandung unsur deret waktu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya pada model regresi.

4.1.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Dengan menggunakan *software* SPSS 20,0 diperoleh hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Coefficients [a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	611959404.524	1831634453.800		.334	.740
	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi(X_1),	37006.376	15637.569	.350	2.367	.022
	Batas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak(X_2)	24.390	60.502	.060	.403	.689

a. Dependent Variable: pphop

Dari perhitungan regresi yang telah diolah diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = 611,959,404.524 + 370,06.376X_1 + 24,390X_2 + \varepsilon$$

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

b_0= 611,959,404.524 Artinya jika kedua variabel bebas (X) bernilai konstan (nol) maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) akan bernilai sebesar 611,959,404.524.

b_1=37,006.37 Artinya jika Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi(X1) meningkat sebesar saturibu dan variabel Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (X2) konstan, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 37,006.37

b_2=24,390 Artinya jika Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (X2) meningkat sebesar satujuta dan variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (X1) konstan, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) akan menurun sebesar 24,390

4.1.2.3 Korelasi Parsial

Dalam penelitian ini, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana keeratan hubungan antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak secara parsial dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Koefisien Korelasi Parsial

Correlations

		Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi(X_1),	Pearson Correlation	.375**
	Sig. (2-tailed)	.007
	N	50
Batas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak(X_2)	Pearson Correlation	.204
	Sig. (2-tailed)	.155
	N	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil olah data menggunakan program SPSS 20.0

a. Hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Pada tabel diatas, terlihat koefisien korelasi yang di dapat adalah sebesar -0,375 termasuk dalam hubungan yang rendah karena berada pada interval korelasi antara “0,20-0,399”. Nilai korelasi bertanda negatif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah berlawanan, artinya semakin tinggi jumlah wajib pajak orang pribadi, maka semakin kecil penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara parsial

terdapat hubungan negatif yang rendah antara jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada delapan KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat I.

b. Hubungan kenaikan penghasilan tidak kena pajak dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan positif yang sangat rendah antara kenaikan penghasilan tidak kena pajak dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada delapan KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat I.

4.1.2.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini merupakan nilai yang menunjukan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Setelah diketahui nilai R sebesar 0,379, maka koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary [b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.379[a]	.144	.107	2.8894E9

a. Predictors: (Constant), Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi(X_1),Batas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak(X_2)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)

KD = R^2 x 100%

= $(0,379)^2$ x 100%

= 14,3%

Dengan demikian, maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 14,3% yang menunjukan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 14,3% terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan sisanya sebesar 85,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini

Untuk melihat bersar pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dilakukan pula perhitungan dengan menggunakan formula *Beta x Zero Order*Dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai *beta* dan *zero order* sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	(Constant)		
	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi(X_1)	.350	.375
	Batas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak(X_2)	.060	.204

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilakukan perhitungan untuk memperoleh pengaruh parsial dari setiap variabel bebas sebagai berikut:

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (X_1) 0,350 X 0,375 = 0,13 atau 13%

Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (X_2) 0,060 X 0,204 = 0,013 atau 1,3%

Berdasarkan perhitungan di atas, bahwa secara parsial jumlah wajib pajak orang pribadi memberikan pengaruh sebesar 13% sedangkan kenaikan penghasilan tidak kena pajak memberikan pengaruh sebesar 1,2%. Sehingga total pengaruh yang diberikan keduanya adalah sebesar 14,3%. Dan 85,7% sisanya di pengaruhi oleh faktor-faktor lain

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis Parsial uji T

Pengujian hipotesis parsial (uji-t) dilakukan untuk membuktikan apakah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadidengan menggunakan program SPSS 20.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	611959404.524	1831634453.800		.334	.740
	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi(X_1)	37006.376	15637.569	.350	2.367	.022
	Batas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak(X_2)	24.390	60.502	.060	.403	.689

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)

Coefficients [a]

1. **Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Nilai t_{tabel} yang digunakan sebagai nilai kritis dalam uji parsial ini adalah sebesar 2,012 atau – 2,012yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan α = 5% dan df (n(50)-k(2)-1) 47 untuk pengujian 2 pihak. Rangkuman hasil pengujian hipotesis parsial disajikan pada tabel berikut:

Pengujian Hipotesis Parsial antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Model	t_{hitung}	$t_{tabel\ (0,05;37)}$	*Sig*	A	Keterangan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	2,367	2,012	0,22	0,50	Ho ditolak	Tidak Signifikan

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 2,367 > $t_{tabel\ (0,50;37)}$ (2,012). Jika digambarkan ke dalam kurva pengujian hipotesis parsial, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} akan tampak seperti berikut:

2. **Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Nilai t_{tabel} yang digunakan sebagai nilai kritis dalam uji parsial ini adalah sebesar 2,012 atau – 2,012 yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan α = 5% dan df (n(50)-k(2)-1) 47 untuk pengujian 2 pihak. Rangkuman hasil pengujian hipotesis parsial disajikan pada tabel berikut:

Pengujian Hipotesis Parsial antara Batas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Model	t_{hitung}	$t_{tabel\ (0,05;37)}$	*Sig*	A	Keterangan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	403	2,012	689	0,50	Ho diterima	Tidak Signifikan

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 403 < $t_{tabel\ (0,50;37)}$ (2,012. Jika digambarkan ke dalam kurva pengujian hipotesis parsial, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} akan tampak seperti berikut:

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pegaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi memberikan kontribusi pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 13% dan sebanyak 87% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Hubungan jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menunjukkan hubungan sangat rendah dan bertanda negatif, Selanjutnya hasil pengujian parsial menunjukkan jumlah wajib pajak orang pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi karena nilai t-hitung (-2,376) lebih besar dari t tabel (-2,012) dan t hitung berada pada daerah penolakan $H_{0,}$ sehingga Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh secara signifikan dari jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di 10 KPP yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat 1.

Hasil Penelitian ini mendukung teori Moh Zain (2008:30) bahwa “Pada dasarnya tidak ada satupun dari verifikasi atau metode teknis lainnya dapat diperluas sampai mencapai jumlah

wajib pajak yang cukup, agar diperoleh efek langsung yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak". Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmad Husein Nasution, Herawati, Dandes Rifa (2009) "*Pengaruh Inflasi,Jumlahwajib pajakdan pemeriksaan Pajakterhadap penerimaan Pajak Penghasilan orang Pribadi Di Kota Padan "*kesimpulan dari peneritian ini adalah jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, penelitian Rahmad, Herawati dan Husein (2014) yang berjudul *"Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemerikasaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi"* kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi memberikan perpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi Aisyah.(2012).

4.2.2 Pengaruh PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan penghasilan tidak kena pajak memberikan kontribusi pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 1,2% dan sebanyak 8,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Hubungan kenaikan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menunjukkan hubungan rendah dan bertanda positif, artinya apabila semakin banyak jumlah wajib pajak orang pribadi, maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi akan meningkat.

Selanjutnya hasil pengujian parsial menunjukkan kenaikan penghasilan tidak kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi karena nilai t-hitung (403) lebih kecil dari t tabel (2,012) dan t hitung berada pada daerah penerimaan $H_{0,}$ sehingga Ho diterima, artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan dari kenaikan penghasilan tidak kena pajak penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di 10 KPP yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat 1.

Penelitian ini sejalan dengan teori Etty Musyasarroh (2012:42) yaitu kenaikan penghasilan tidak kena pajak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan karena dengan kenaikan besaran penghasilan tidak kena pajak mempersulit perolehan pajak penghasilan. SEDANGKAN Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novita Erawati Farnika (2008) yang berjudul *"Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan"* kesimpulan dari penelitian ini adalah Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak mengakibatkan penurunan penghasilan tidak kena pajak.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1.) Jumlah wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Masalah penerimaan pajak penghasilan yang tidak mencapai target dikarenakan wajib pajak yang tidak melapokan SPT nya ke kantor pajak setempat walaupun menurut data setaiap tahun wajib pajak terus mengalami kenaikan
2.) Kenaikan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada 10 KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat 1. Masalah yang terjadi yaitu realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak mencapai target hal ini, karena diberlakukannya kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi rendah.

5.2. Saran

1.) Saran Praktis
   a) maka perlu dilakukan Ekstensifikasi Wajib Pajak atau perluasan Subjek pajak yang berkala, contohnya dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah KPP untuk mewajibkan semua karyawan, meningkatkan kinerja pelayanan petugas saat menerima laporan pajak dari Wajib Pajak, hal tersebut untuk menghindarkan Wajib Pajak dari sikap malas untuk membayar pajak dikarenakan pelayanan yang kurang baik

b) Dalam melaksanakan peningkatan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),pemerintah harus menyesuaikan dengan upah minimum pekerja di tiap propinsi agar jumlah Wajib Pajak yang tereliminasi akibat kenaikan PTKP ini tidak terlalu banyak. Jika jumlah Wajib Pajak yang tereliminasi terlalu banyak, maka akan dapat mengurangi penerimaan pajak dan hal itu sangat merugikan negara,

2.) Saran Akademis (Bagi Peneliti Lain)
Bagi penelitian selanjutnya, variabel bebas yang digunakan hendaknya tidak hanya jumlah wajib pajak orang pribadi dan kenaikan penghasilan tidak kena pajak, karena masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Selain itu, jumlah sampel yang diteliti dan banyaknya tempat penelitian sebaiknya diperbanyak untuk memperkuat hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Musyasarroh, Etty.2012.*Perpajakan Brevet A dan B.*Buku Seru.Jakarta

Djoko Mulyono.2009.*Pengantar PPh dan PPh 21*.Yogyakarta:PT.Andi

Erly Suandy.2011.Ilmu Hukum Pajak.Jakarta:Salemba Empat.

John Hutagaol.2007.*Perpajakan Isu-Isu Kontempore*.Yogyakarta:Graha Ilmu

Mardiasmo.2009.*PERPAJAKAN EDISI REVISI 2009*.Yogyakarta:Penerbit ANDI.

Mardiasmo.2011.*PERPAJAKAN EDISI REVISI 2011*.Yogyakarta:Penerbit ANDI.

Moch.Nazir.2003,*Metode Penelitian,*Jakarta:Salemba Empat

Rimsky K.Judiseeno.2007,*Perpajakan,*Jakarta:Gramedia Pustaka Ilmu.

Moh Zain.2008.*Manajemen Perpajakan Edisi 3 Cetakan ke 2*.Jakarta:Salemba Empat.

Santosa dan Ashari.2005.*Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel dan SPSS*.Yogyakarta.Andi.

Siti Resmi.2011.Perpajakan Teori dan Kasus.Jakarta:Salemba Empat.

Siti, Kurnia Rahayu .2010.*Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*.Yogyakarta:Graha Ilmu.

Singgih Santoso.2012.*SPSS Versi Mengolah Data Statistik Secara Profersional*.Jakarta:Elexmedia Komputindo.

Sugiono.2011.Metode *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Bandung*: Alfa Beta.

Sugiono.2013.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Bandung*: Alfa Beta

Suryadi.2006.*Pelayanan Perpajakan*.Jakarta:Yayasan Kawula Indonesia.

Umi Narimawati.2010.*Panduan Karya Ilmiah*.Bekasi:Genesis.

Umi Narimawati.2008.*Panduan Karya Ilmiah*.Bekasi:Genesis.

Waluyo.2010.*Perpajakan Indonesia*.Jakarta:Salemba Empat.

JURNAL

Aliza.2014.*Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas.*

Amina, Lamutu.2014.*Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Manado*.Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal.374-382.

Novita E.2013.*Analisis Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Jurnal Perpajakan, Vol 1*.

Dina dan Putu.2009. *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu)* ournal Of Indonesian Applied Economics Vol. 3 No. 2 Oktober 2009, hlm. 135-149

Dimas, Heru dan Bondan.2014. yang berjudul *"Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan"*

Rahmad Husein Nasution, Herawati, Dandes Rifa (2009) *Pengaruh Inflasi,Jumlahwajib pajakdan pemeriksaan Pajakterhadap penerimaan Pajak Penghasilanorang Pribadi Di Kota Padang*

Herawati dan Agusti.2009.*Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang dipemoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang.*

Rahmad, Herawati dan Husein.2014.berjudul *"Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemerikasaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi"*

Aisyah.2012. 1 *Pengaruh Jumlah Wajib Efektif Terhadap Penerimaanpajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang*

Vergina dan Ratna.2012.*Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*